



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MAGELANG DALAM MUSRENBANG RKPD 2020

DRS. H. SOENARNO
WAKIL KETUA DPRD KAB. MAGELANG

25 MARET 2019

Pokok-pokok Pikiran DPRD

memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya (2018) yang belum dibahas dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana (2019).

Dasar Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Kaitan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup :

A. Pengolahan Data dan Informasi

B. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

C. **Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD**

(Pasal 107 Permendagri 54 Tahun 2010)

Ada 2 hal yg disampaikan :

1. Pandangan dan pertimbangan DPRD kepada Eksekutif dalam menyusun skala prioritas pembangunan 2020.
2. Rumusan/usulan DPRD dalam bentuk program/kegiatan yang berasal dari :
 - Hasil Reses DPRD dan Jaring Asmara
 - Rapat dengar pendapat
 - Pandangan Umum Fraksi

Pandangan dan pertimbangan DPRD dalam menyusun skala prioritas pembangunan 2020

1. APBD HARUS TEPAT WAKTU

- Penetapan APBD 2018, 2019 tepat waktu dan 2020 harus tepat waktu.
- Berkaca dari Penetapan APBD 2017 yang terlambat, berakibat terkena sanksi Menteri Keuangan (dana dikurangi ±Rp. 47 M pada APBD 2018)
- Keterlambatan akan berpengaruh pd efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Saran : Penyerahan KUA PPAS 2020 tidak terlambat dan harus diserahkan kepada DPRD bulan **Juli 2019**.

2. PENGELOLAAN ANGGARAN BELUM MAKSIMAL

- APBD 2018 Rp. 2,7 Trilyun - PAD Rp. 374 M
- APBD 2019 Rp. 2,8 Trilyun - PAD Rp. 426 M (proporsi PAD \pm 15%) → masih rendah → PAD 2020 harus naik signifikan.
- Potensi PAD: *PBB Perkotaan, PPU, BPHTB, Retribusi Pasar dan Metrologi, RSUD, BUMD, Menara Telekomunikasi, Parkir dll.*
- Belanja Modal baru sekitar 20% dari APBD (idealnya 30%).
- Penyerapan anggaran 2018 sebesar **86,35%**.
- SILPA relatif besar : **2013 Rp. 417 M, 2014 Rp. 373 M, 2015 Rp. 492 M, 2016 Rp. 457 M, 2017 Rp. 303 M, 2018 Rp. KURANG LEBIH 300 M**

- Besarnya SILPA cerminan APBD kurang sehat, menggambarkan **perencanaan dan kinerja yang kurang baik**
- APBD 2020 agar dirancang **Belanja Modal menjadi 25%** → menggambarkan keberpihakan APBD kepada masyarakat → dapat membiayai proyek-proyek tertunda maupun proyek strategis bagi publik

3. PENCAPAIAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

- WTP sebagai wujud **akuntabilitas** pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah oleh BPK.
- 2017, 2018 sudah mendapat WTP, 2019 dan 2020 harus WTP.

4. REFORMASI BIROKRASI

- Masih banyak **keluhan atas kualitas pelayanan, lamanya perizinan → ditata serius → menjadi Kabupaten Ramah Pelayanan**
- Banyak kekosongan jabatan dan dijabat **Pelaksana Tugas (Plt) bertahun-tahun** → berdampak pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Memilih pejabat yang kompeten, berintegritas dan profesional

5. Prioritas Program Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan

- Alokasikan anggaran yang cukup Untuk Kesehatan dan pendidikan sebagai urusan wajib.
- **Sinergi APBD dan Dana Desa** untuk pengentasan kemiskinan → RTLH dan program pemberdayaan.

6. Prioritas pada Bidang Unggulan Pertanian, UMKM dan Pariwisata

- Fokus peningkatan daya saing → Menjadikan Magelang sentra-sentra produk pertanian, sentra perikanan darat, sentra-sentra UMKM.
- Pariwisata fokus pada penataan obyek wisata unggulan

7. Pembangunan Infrastruktur

- Infrastruktur Jalan/jembatan/irigasi harus dalam kondisi baik.
- Magelang Rawan Bencana → Pemeliharaan Infrastruktur jalan evakuasi diperhatikan.
- Kualitas bangunan harus baik dan diawasi ketat.
- Manajemen proses lelang yang terencana (agar tidak terlambat)

8. Penguatan Pemerintah Desa

- Perencanaan Kabupaten (RPJMD) dan Desa (RPJMDes) harus selaras.
- Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan anggaran desa → Program sinergi, Tertib administrasi dan tercipta akuntabilitas.
- Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

9. Pembangunan Islamic Center dan Sport Center 2020

- Sebagai program prioritas → direncanakan matang dari sisi : kemanfaatan, lokasi, penganggaran

10. Pembangunan Pasar Kaliangkrik

- Merupakan proyek besar dan strategis → pastikan berjalan sesuai rencana
- Perlu penanganan matang dan pengawasan serius.
- Mendorong revitalisasi pasar tradisional lainnya (Borobudur, Windusari, Salaman)

ISU-ISU MENONJOL

1. Penataan Kawasan Borobudur

- Penataan tata ruang dengan menyesuaikan perencanaan kawasan oleh pemerintah pusat.
- Penataan pasar, terminal dan PKL → kondisi kumuh → tidak mendukung sebagai destinasi pariwisata internasional

2. Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang - Jogja

- Bagaimana progresnya?
- Pembangunan Jalan Tol akan berdampak pada pertumbuhan kawasan → perlu kajian mendalam agar pembangunan Tol bermanfaat bagi perekonomian daerah
- Mengambil langkah-langkah proaktif dan intens melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat

3. Pemanfaatan Obyek Wisata Kalibening

- Sudah selesai → Segera difungsikan untuk peningkatan daya tarik wisata, pemenuhan kebutuhan rekreatif masyarakat dan peningkatan PAD

4. **Pasar Muntilan dan UKM Center segera difungsikan**

- Hasil-hasil pembangunan agar bisa segera dinikmati masyarakat
- Dibangunnya Pasar Muntilan sekaligus dapat mengatasi masalah : Parkir - EyeK – PKL
- Pasar-pasar dikelola profesional dengan **e-Retribusi** untuk peningkatan PAD

5. **Smart City**

- Sudah berjalan 2 tahun namun belum dirasakan implementasi program ini.
- Perlu keseriusan untuk kepentingan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

6. **Penegakan Aturan Perda**

- Belum optimal, terkait pelanggaran tata ruang dan pelanggaran perizinan toko modern

7. **Pemilu 2019**

- Berjalan kondusif, aman dan partisipasi masyarakat tinggi.
- ASN → Netral dan Fokus pada program/kegiatan 2019

Mengingatn kembali

- ✓ Perencanaan dan penganggaran seperti dua sisi koin mata uang, merupakan dua sisi kebijakan yang tidak bisa dipisahkan.
 - ✓ Perencanaan tanpa penganggaran **seperti janji palsu.**
 - ✓ Penganggaran tanpa perencanaan **seperti berlayar tanpa kompas**
 - ✓ Perencanaan dan penganggaran yang buruk sama dengan **merencanakan kegagalan pembangunan.**



Terima Kasih
Selamat Bermusyawarah